

# KEBIJAKAN PENANGANAN KOTA LAMA SEMARANG

Oleh : Herbasuki

## ABSTRACT

*The Old Area of Semarang is a part of multi ethnical kampong network flourished since the period of 1500-1700. This area's existence should be seriously managed by the government for the sake of its preservation and revitalization. It is recommended that the Old Semarang Area should be managed by using rational comprehensive as well as brainstorming problem-solving models. In the implementation of these models it is expected that Semarang City Government, universities, non-government organizations, various associations and other interest groups understand more each character of the policy alternatives. Therefore it is expected that there will be optimalization in the implementation of the selected alternative.*

**Keywords :** *Old Semarang Area, revitalization, preservation*

## A. PENDAHULUAN

Kota Lama Semarang merupakan situs kota benteng Belanda yang dulu dikenal sebagai *Europesche-Buurt*. Dibangun semasa pemberontakan orang Cina tahun 1742 sebagai benteng pertahanan dan kemudian dirubuhkan tahun 1824 seiring dengan rencana pengembangan kota Semarang masa itu. Situs kota benteng yang semula dibangun sebagai kota yang dikelilingi parit ini luas wilayahnya mencapai  $\pm$  31,25 hektar yang terbagi atas 23 hektar lahan terbangun dan 8,25 hektar lahan yang belum terbangun.

Kota lama sendiri sebenarnya merupakan bagian dari mata rantai perkampungan multi etnis Semarang yang tumbuh sejak periode tahun 1500-1700. Pemukiman etnis

tersebut sebagian besar berada di wilayah hinterland dan disebut kampung sedangkan yang disebut pusat kota adalah pemukiman bangsa Belanda yaitu di dalam kota benteng. Selain Kota Lama, perkampungan multi etnis yang masih dapat ditemui sekarang antara lain *Maleidsche Kampong* (Kampung Melayu), *De Chinesche Kampong* (Pecinan), Petudungan, Kampung Kulitan serta Kawasan Kauman dan Johar.

Sebagai bekas domain politik, pemerintahan, budaya, dan sekaligus pusat perdagangan paling hidup di Jawa Tengah, Kota Lama masih menyisakan kejayaan masa lalu dan kekayaan *urban design*. Namun proses dekolonisasi yang diikuti dengan kurang terkelolanya kawasan telah melemahkan potensi yang ada.

Berturut-turut terjadilah *business flight* dan *residential flight*, sebagian besar penduduk lama telah pindah sehingga hanya tersisa 17,3% penduduk lama yang berasal dari masa dekolonisasi. Nadi kehidupan kawasan hanya mengandalkan 8,45% kawasan yang masih digunakan sebagai hunian, 9,62% fungsi komersial dan 16% fungsi perkantoran, sedangkan sisanya didominasi oleh fungsi pergudangan dan industri kecil/menengah dan bahkan sebagian dibiarkan terbengkalai tanpa fungsi.

Situasi di atas menjadi semakin parah karena merosotnya kondisi lingkungan hidup yang tidak sehat, rasa tidak aman dan hilangnya kenyamanan dalam kawasan akibat rusaknya infrastruktur. Bahkan pada akhir 1993, hanya 30% jalan dan taman yang terawat. Kondisi ini bertahan hingga munculnya proyek *urban road* tahun 1996/1997 yang merupakan implementasi rencana *pavement* dalam RTBL Kota Lama pada koridor jalan utama sepanjang 4,3 km. Proyek ini merupakan salah satu bukti komitmen Pemerintah Kota Semarang terhadap upaya revitalisasi. Proyek ini kemudian diikuti dengan proyek *pavement* lanjutan pada tahun berikutnya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Penanganan Kota Lama.**

Upaya pelestarian bangunan dan lingkungan di Kota Semarang telah dilakukan dengan menggu-

nakan landasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah No. 10/1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya serta menggunakan Peraturan-peraturan yang mendukung serta berupaya untuk melindungi kawasan Kota Lama.

Adapun konsep-konsep yang digunakan untuk penyusunan kebijakan maupun program adalah sebagai berikut : a) Pelestarian tapak sejarah pertumbuhan "Kota Semarang" dimulai dari Pertengahan Abad XV pendirian Koloni di Pulau Tirang oleh Ki Pandan Arang sampai dengan sekarang; b) Pelestarian adalah merupakan upaya memberikan Masa Depan kepada Masa Lalu (*A Future for the Past*); c) Pelestarian merupakan upaya terintegrasi secara terpadu pada Rencana Tata Ruang pada semua tingkatan; d) Pelestarian merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan antara kesejarahan dan pertimbangan ekonomi/komersial; e) Pelestarian adalah upaya pembangunan untuk meningkatkan vitalitas yang ada serta menghidupkan kembali vitalitas lama yang telah pudar pada suatu lingkungan dan bangunan bersejarah; f) Pelestarian adalah upaya yang mendorong semangat kerjasama pemerintah, negara asing, swasta, dan masyarakat yang seluas-luasnya; dan g) Pelestarian yang dilakukan hendaknya sejauh mungkin menyerap

pokok-pokok pikiran the Burra Charter yang dilanjutkan oleh ICOMOS pada tahun 1981.

Secara khusus program ini akan menjadi contoh praktis bagi konsep-konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, yang sekarang menjadi fokus pembangunan. Program ini sekaligus menjadi salah satu pemecahan masalah di dalam menghadapi krisis ekonomi melalui pengembangan usaha-usaha baru yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat kecil.

Adapun program-program inovatif yang akan dilakukan di Kawasan Kota Lama Semarang adalah :

- a. Mengembalikan *spirit of place* pada kawasan Kota lama yang sekarang hanya tinggal fisik saja, ibarat raga manusia tanpa roh;
- b. Mengembangkan sebuah konsep pengelolaan untuk pengembangan Kawasan Kota Lama Semarang melalui pemberdayaan masyarakat;
- c. Menggabungkan dua pendekatan yang saling bertolak belakang, yaitu pendekatan konservasi yang cenderung mempertahankan kawasan sebagai kawasan bersejarah, dan pendekatan pertumbuhan yang pada umumnya berlawanan dengan pendekatan konservasi, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan prasarana dan sarana untuk kegiatan pariwisata bersejarah;
  - 2) Memberdayakan masyarakat untuk terlibat di dalam pengembangannya, dengan mendukung melalui penyediaan dana melalui sebuah organisasi yang bertumpu pada masyarakat;
  - 3) Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan keahlian berusaha dan penyuluhan peningkatan apresiasi terhadap upaya konservasi melalui kegiatan-kegiatan organisasi bertumpu kepada masyarakat;
  - 4) Penciptaan daya tarik (*generating factor*);
  - 5) Merubah kesan kawasan-kawasan yang kurang bersahabat dengan lingkungan sekitarnya sehingga akan mempengaruhi perilaku seseorang.
- d. Pembentukan *Community Based Organization* (CBO) untuk memberikan keuntungan kepada anggotanya dalam bentuk :
- 1) Memperkuat *Bargaining Position* (posisi tawar-menawar) dari setiap pemilik dan pengguna bangunan-bangunan di Kawasan Kota Lama;
  - 2) Memberikan bantuan (konsultasi) masukan-masukan bagi para pemilik dan pengguna bangunan di dalam menyelesaikan permasalahan yang

- berkaitan dengan pengembangan kawasan;
- 3) Mempermudah akses dari Pemerintah Daerah untuk menampung aspirasi-aspirasi dari para pemilik dan pengguna bangunan di Kawasan Kota Lama Semarang;
  - 4) Mempermudah akses Pemerintah daerah di dalam memberikan informasi kebijakan-kebijakan atau rencana-rencana pembangunan.

## **2. Prosedur Analisis Kebijakan**

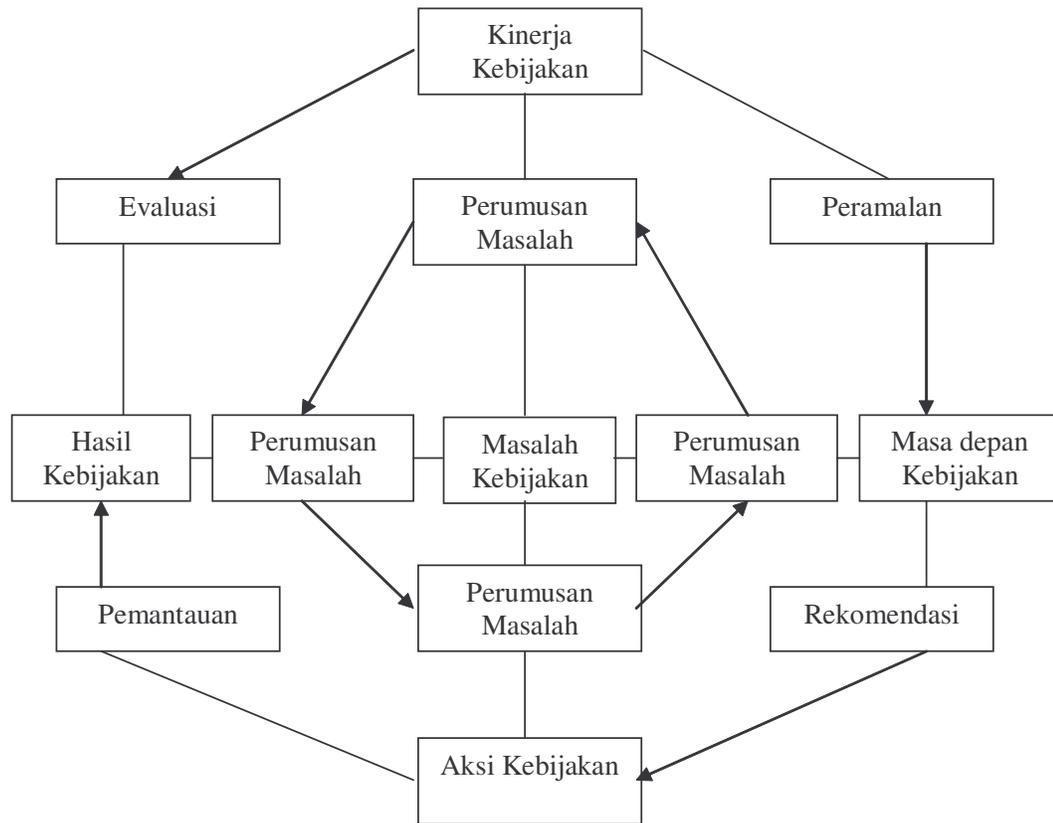
Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Peranan prosedur adalah untuk menghasilkan informasi mengenai masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan.

Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia : definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Dalam analisis kebijakan prosedur-prosedur tersebut memperoleh nama-nama khusus. Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.

Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa datang dari alternatif kebijakan, termasuk untuk tidak melakukan sesuatu. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah. Peman-tauan (deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Evaluasi yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.

Menurut Dunn (1998) kelima prosedur analisis kebijakan tersebut disajikan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Analisis Kebijakan yang Berorientasi Pada Masalah



Sumber : Dunn (1998)

### 3. Perumusan Masalah.

Metode-metode dalam perumusan masalah sangat beragam, di antaranya adalah *brainstorming*. *Brainstorming* adalah metode untuk menghasilkan ide-ide, tujuan-tujuan jangka pendek, dan strategi-strategi yang membantu mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan kondisi-kondisi permasalahan. *Brainstorming* dirancang oleh Alex Osborn sebagai suatu cara untuk meningkatkan kreatifitas, untuk menghasilkan sejumlah perkiraan mengenai solusi-solusi yang potensial.

*Brainstorming* meliputi beberapa prosedur-prosedur sederhana, yaitu :

- a. Kelompok-kelompok *brainstorming* harus disusun sesuai dengan sifat masalah yang diinvestigasi. Hal ini biasanya berarti seleksi terhadap orang-orang yang sangat mengetahui kondisi yang ada, yaitu para ahli;
- b. Proses pemunculan ide, dan harus benar-benar terpisah karena diskusi kelompok yang intensif dapat dirintangi oleh kritik dan debat yang prematur;

- c. Suasana aktivitas-aktivitas *brainstorming* harus sedapat mungkin dijaga tetap terbuka dan permisif selama tahap pemunculan ide;
- d. Fase evaluasi ide dimulai setelah semua ide dimunculkan, artinya fase pertama telah tuntas;
- e. Pada akhir fase evaluasi ide, kelompok harus memprioritaskan ide-ide dan memadukannya dalam sebuah proposal berisi konseptualisasi masalah dan potensi pemecahannya.

*Brainstorming* merupakan prosedur yang sangat serba guna mencakup aktivitas-aktivitas yang relatif terstruktur atau tidak terstruktur tergantung pada tujuan analisis-analisis dan hambatan-hambatan praktis terhadap situasi. Aktivitas-aktivitas *brainstorming* yang relatif tidak terstruktur seringkali terjadi di lembaga-lembaga pemerintah dan *think thank* publik dan swasta.

Diskusi-diskusi masalah-masalah kebijakan bersifat informal dan sebagian besar spontan, termasuk interaksi generalis dan spesialis dari beberapa bidang dan disiplin ilmu. Aktivitas-aktivitas *brainstorming* dapat pula lebih terstruktur, dengan berbagai peralatan yang digunakan untuk mengkoordinasikan atau memfokuskan diskusi-diskusi kelompok. Peralatan-peralatan ini meliputi pengadaan seminar-seminar keputusan yang terus menerus yang dengan maksud menghindari

suasana konvensional yang terbatas meliputi suatu tim ahli yang bermotivasi tinggi. Peralatan lain untuk mengkoordinasikan dan memusatkan aktivitas-aktivitas *brainstorming* adalah penyusunan skenario, yang menggambarkan kejadian-kejadian hipotetik di masa depan yang dapat mengubah suatu situasi permasalahan.

Perumusan masalah adalah tahap yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan. Banyak pakar mengatakan bahwa keberhasilan pengambilan keputusan sebagian besar ditentukan oleh keberhasilan dalam mengenali dan merumuskan masalah. Tanpa kemampuan untuk memahami karakteristik masalah yang dihadapi, analisis tidak akan dapat merumuskan tujuan kebijakan dan indikator keberhasilan kebijakan itu. Karena itu tidak mengherankan kalau banyak analisis dan praktisi menghabiskan separuh waktunya untuk merumuskan masalah.

Masalah publik berbeda dengan masalah privat dalam beberapa hal. Salah satu perbedaan penting adalah bahwa masalah publik selalu mengandung *shared concern*. Artinya keberadaan masalah publik itu dirasakan oleh dan menjadi perhatian banyak orang. Satu kejadian atau kasus yang tidak menarik perhatian banyak orang tidak bisa dikatakan sebagai masalah publik, tetapi disebut masalah privat. Kejadian itu bisa menjadi masalah publik kalau

dampak dari kejadian itu mempengaruhi kepentingan orang banyak. Para perencana dan pembuat kebijakan seharusnya hanya menaruh perhatian kepada masalah publik. Dengan kata lain, masalah privat tidak menjadi subyek dari pembuatan kebijakan publik.

Masalah publik seringkali memiliki dimensi ganda. Masalah itu biasanya dipengaruhi oleh serangkaian fenomena sosial yang saling berkaitan. Ini menyebabkan pemahaman terhadap satu masalah publik menjadi tidak mudah karena faktor-faktor yang mempengaruhinya cukup banyak dan saling berinteraksi satu sama lain. Bahkan pemahaman terhadap satu masalah publik seringkali berbeda-beda, tergantung cara pandang yang dipakai. Analisis yang menggunakan cara pandang yang berbeda besar kemungkinan akan memiliki pemahaman yang berbeda. Kejahatan misalnya, bisa menjadi fenomena yang berbeda-beda, misalnya fenomena ekonomi, hukum, sosial, kultural maupun kejiwaan. Demikian juga pemahaman tentang masalah revitalisasi Kota Lama Semarang, harus dilakukan dari berbagai sudut pandang.

Kemampuan untuk merumuskan masalah sangat bergantung pada kemampuan untuk memahami karakteristik-karakteristik dari masalah yang dihadapi (*the nature of the problem*). Dalam melihat masalah pengangguran misalnya, seorang analis akan dihadapkan

pada berbagai isu dan fenomena yang saling berhubungan. Pengangguran berkaitan dengan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan ketersediaan lapangan kerja. Karenanya masalah pengangguran dapat diperkecil dengan melakukan intervensi pada jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja. Akan tetapi pengangguran sering kali juga berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan. Artinya, pengangguran merupakan satu akibat dari ketidaksesuaian antara jenis kesempatan kerja yang tersedia dengan kualitas dan jenis tenaga kerja yang ada.

Bahkan untuk sebagian orang mungkin pengangguran menunjukkan rendahnya insentif untuk masuk dalam pasaran kerja. Insentif untuk bekerja mungkin lebih kecil daripada *opportunity costs* yang harus dibayar sebagai akibat dari kegiatannya di pasar kerja. Oleh karena itu pengangguran dapat juga dilihat sebagai masalah sikap terhadap pekerjaan. Masalah pengangguran memiliki dimensi yang cukup banyak, sehingga masalah itu cenderung menjadi kompleks.

Demikian pula halnya dengan permasalahan revitalisasi Kota Lama Semarang yang harus dilihat dari berbagai sudut dan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pemahaman terhadap karakteristik masalah memungkinkan analis menentukan tujuan kebijakan. Artinya, apa yang harus dilakukan

oleh pemerintah agar masalah publik itu dapat diperkecil atau dihilangkan sama sekali. Tujuan kebijakan itu seharusnya juga dirumuskan secara spesifik dan jelas, kalau bisa dalam ukuran kuantitatif, sehingga indikator keberhasilan kebijakan itu bisa dengan mudah ditentukan. Ini penting dilakukan agar pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan itu dapat dilakukan dengan mudah dan murah.

Analisis juga perlu menjelaskan mengapa masalah itu penting untuk dipecahkan dan untuk siapa masalah itu penting. Informasi ini perlu dijelaskan agar pihak-pihak yang berkepentingan dengan kebijakan itu dapat segera diketahui. Dengan membuat daftar siapa yang akan dipengaruhi oleh kebijakan itu, maka berbagai antisipasi terhadap hambatan dan dukungan terhadap kebijakan itu dapat dilakukan.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah menginventarisasi program dan kegiatan pemerintah yang telah atau sedang dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan itu dan mengapa program itu tidak cukup sehingga kebijakan baru perlu dibuat. Misalnya, tujuan utama dari revitalisasi Kota Lama Semarang perlu dirumuskan dengan jelas sehingga tindakan atau program-program yang dilakukan dapat terarah pada pencapaian tujuan yang dirumuskan tersebut. Analisis perlu mengidentifikasi program-program pemerintah untuk meningkatkan revitalisasi Kota Lama Semarang.

Menurut Agus Dwiyanto (1993), secara ringkas pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam merumuskan masalah dan menentukan tujuan kebijakan adalah sebagai berikut :

- a. Apa karakteristik dari masalah yang dihadapi?
- b. Mengapa masalah itu penting? Untuk siapa masalah itu penting?
- c. Apa tujuan umum dan spesifik dari kebijakan?
- d. Apa ukuran-ukuran efektivitas kebijakan itu?
- e. Apa program-program yang sedang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan itu? Mengapa tidak cukup?

#### **4. Identifikasi Faktor-faktor Penyebab.**

Pengenalan terhadap sifat masalah sekaligus berguna dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya suatu masalah kebijakan. Masalah timbul bukan oleh satu sebab, tetapi kombinasi dari berbagai penyebab. Dalam hal ini perumus kebijakan perlu mengidentifikasi seluruh faktor yang diduga mendukung munculnya masalah, kemudian menyeleksi faktor-faktor yang dianggap sebagai faktor-faktor dominan, dan dari faktor-faktor yang dominan tersebut dicari faktor-faktor yang dapat diubah melalui penerapan kebijakan publik tertentu.

#### **5. Pemetaan Masalah**

Situasi problematis biasanya tidak dialami oleh semua penduduk,

tetapi sekelompok penduduk. Dalam perumusan masalah, lingkup permasalahan perlu diperjelas antara lain dengan mengidentifikasi siapa yang mengalami situasi problematis. Identifikasi yang dilakukan menjadi sangat penting dalam menentukan kelompok sasaran dari suatu program yang hendak diselenggarakan. Dalam pemetaan masalah perlu juga dilihat keterkaitan satu masalah dengan masalah lain, sehingga dapat diupayakan pemecahan masalah secara lebih integratif.

## 6. Model Kebijakan.

*Policy Model* (Model Kebijakan) adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu (Dunn, 1998). Model kebijakan merupakan rekonstruksi artifisial dari realitas dalam wilayah yang merentang dari energi dan lingkungan sampai kemiskinan, kesejahteraan dan kejahatan. Model kebijakan merupakan alat artifisial untuk menyusun secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman tentang situasi masalah.

Model kebijakan bermanfaat dan bahkan harus ada. Model merupakan penyederhanaan sistem masalah dengan membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analis kebijakan. Model-model kebijakan dapat membantu membedakan hal-hal yang esensial dan yang tidak esensial dari situasi

masalah, mempertegas hubungan antara faktor-faktor atau variabel-variabel penting, dan membantu menjelaskan dan memprediksikan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan.

Model-model kebijakan juga dapat memainkan peran kreatif dan kritis di dalam analisis kebijakan dengan mendorong para analis untuk membuat asumsi-asumsi eksplisit mereka sendiri dan untuk menantang ide-ide konvensional maupun metode analisis.

Menurut Nicholas Henry analisis kebijakan dapat dilihat dari dua sudut yaitu : a) dari sudut proses, lebih bersifat deskriptif, apabila menggambarkan bagaimana kebijakan itu dibuat; b) dari sudut hasil lebih bersifat preskriptif, apabila menunjukkan cara-cara untuk meningkatkan kualitas isi, hasil, dan akibat dari kebijakan (Islamy, 1994).

Berdasarkan pemilahan analisis kebijakan ini, maka untuk menganalisis permasalahan yang terdapat di kawasan Kota Lama digunakan analisis kebijakan preskriptif, untuk meningkatkan kualitas isi, hasil, dan akibat dari kebijakan yang sudah dirumuskan guna menghidupkan kembali kawasan tersebut. Hal ini karena berbagai kebijakan telah diambil (seperti pavingisasi) belum dapat memberikan rangsangan untuk membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan di kawasan tersebut.

Model yang dapat diterapkan dalam pendekatan preskriptif adalah

rasional komprehensif (Dunn, 1998). Karakteristik utama model ini adalah bahwa dilakukan pemilihan secara nalar dan lengkap tentang perlunya mengambil arah tindakan tertentu untuk memecahkan masalah kebijakan.

Dalam prakteknya model ini menghendaki adanya persyaratan tertentu yaitu, pembuat keputusan harus :

- a. Mengidentifikasi masalah kebijakan yang diterima sebagai konsensus oleh semua pelaku kebijakan yang relevan;
- b. Mengidentifikasi dan menurutkan secara konsisten tujuan dan sasaran yang pencapaiannya mencerminkan pemecahan masalah;
- c. Mengidentifikasi semua pilihan kebijakan yang dapat memberi kontribusi terhadap pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran;
- d. Meramalkan semua konsekuensi yang akan dihasilkan oleh seleksi setiap alternatif;
- e. Membandingkan setiap pilihan dalam hal akibatnya terhadap pencapaian setiap tujuan dan sasaran;
- f. Memilih alternatif yang memaksimalkan tujuan.

Menurut model rasional komprehensif, keenam persyaratan tersebut dimaksudkan untuk membuat kebijakan yang rasional. Model ini sangat menekankan pada pendekatan cara dan tujuan,

sehingga setiap pembuat kebijakan harus senantiasa mentaati persyaratan tersebut. Di samping itu menurut asumsi model rasional komprehensif nilai-nilai utama yang ada di masyarakat secara keseluruhan dapat dikenali dan dinilai bobotnya. Jadi tidak hanya cukup mengenali dan menilai bobot nilai-nilai kelompok tertentu dan mengabaikan nilai-nilai kelompok-kelompok yang lain. Dengan kata lain pembuat kebijakan harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang nilai-nilai masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu dibutuhkan informasi lengkap untuk dapat menilai konsekuensi-konsekuensi masing-masing alternatif kebijakan, analisis harus mempunyai kemampuan untuk meramalkan secara jitu konsekuensi masing-masing alternatif, dan untuk secara tepat menghitung rasio biaya dan keuntungan setiap alternatif kebijakan tersebut.

## H. PENUTUP

Penggunaan model rasional komprehensif dan metode perumusan masalah *brainstorming* dapat melibatkan semua pihak (Pemerintah Kota Semarang, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya), sehingga mereka yang terlibat diharapkan lebih dapat memahami setiap karakter alternatif kebijakan yang akan diambil. Model rasional komprehensif menjelaskan cara

kebijakan itu seharusnya dibuat, dan unsur-unsur dalam proses konversi yang berfungsi mengubah masukan-masukan dari lingkungan menjadi keluaran yang optimal.

UU No. 22 Tahun 1999 memberikan perluasan kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, sangat mendukung upaya pengembangan kawasan Kota Lama. Antisipasi Pemerintah Kota Semarang harus lebih bersifat mengakomodasikan kepentingan masyarakat dengan sistem *bottom up planning* dan mengutamakan peran Pemerintah Kota sebagai pelayan masyarakat.

Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan Pemerintah Kota untuk mendukung upaya pengembangan kawasan Kota Lama Semarang di antaranya menurut (Djoko Marsudi, 1999) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kerjasama antar Pemda, lembaga terkait intern Pemerintah Kota Semarang, LSM, Asosiasi Profesi, Internasional, Penyandang dana serta *stakeholder* lainnya;
2. Perencanaan dan perancangan Kawasan Kota Lama sesuai dengan hasil kajian yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan otonomi daerah;
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang akan membangun Kawasan Kota Lama dengan memberikan alternatif 'modal' pembangunan yang sesuai dengan tata lingkungan yang telah disepakati;

4. Kampanye pembinaan kesadaran masyarakat mengenai pelestarian dalam berbagai bentuk kegiatan penyuluhan, penataran, promosi, dan pemberian penghargaan/pemugaran;
5. Dibentuknya Lembaga/Institusi Teknis yang menangani secara langsung permasalahan pengembangan kota lama yang tetap mengacu pada semangat Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Program kegiatan yang akan dilakukan di Kawasan Kota Lama pada dasarnya merupakan kegiatan yang pertama kali akan dilakukan di Indonesia. Oleh karenanya kegiatan ini menjadi *pilot project* bagi pengembangan kawasan-kawasan bersejarah di kota-kota besar lainnya di Indonesia, misalnya Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, Muhadjir. 1993. Tahap-tahap Perumusan Masalah. Makalah seminar. Yogyakarta.
- Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, terjemahan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. Analisis Kebijaksanaan Sebagai Teknik Pemecahan Masalah-masalah Sumber Daya Manusia. Makalah seminar, Yogyakarta.

Islamy, Irfan. 1994. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*, terjemahan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marsudi, Djoko. 1999. Antisipasi Pemerintah Kota Semarang dalam Menghadapi Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 199 Terhadap pengembangan Kawasan Kota Lama. Makalah seminar. Semarang.

Siswanto, Andy. 1999. Catatan Kecil dari Perjalanan Panjang Revitalisasi dan Konservasi Kota Lama Semarang. Makalah seminar. Semarang.

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.